

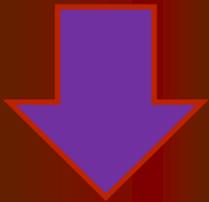
# PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H.MH.  
FH UNAIR

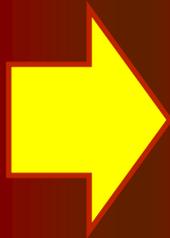
# PENGADUAN

- penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang bertanggungjawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.

Manusia



Lingkungan Hidup  
yang baik & sehat



- Tanah
- Udara
- Air



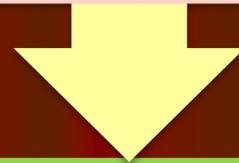
HAK  
ASASI  
MANUSIA

Pasal 65, UU No.32 tahun 2009  
*tentang Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup*

## Hak Atas Lingkungan

Pasal 28 H ayat (1)

Pasal 28 I ayat (4)



## Hak Sosial

Protect

Respect

Fullfill



## Fungsi Negara

Provider

Regulator

Entepreneur

Umpire

# Ruang lingkup Hukum Administrasi



Peran serta masyarakat

Perlindungan  
hukum

```
graph TD; A[Perlindungan hukum] --- B[Represif]; A --- C[Preventif]
```

Represif

Preventif

Preventif

```
graph TD; Preventif --> Tujuan; Preventif --> Bentuk; Preventif --> Proses; Tujuan --> Mencegah_kerugian[Mencegah kerugian]; Bentuk --> Keberatan_Pengaduan[Keberatan, Pengaduan public hearing]; Proses --> Administrasi;
```

Tujuan

Bentuk

Proses

Mencegah  
kerugian

Keberatan,  
Pengaduan  
public hearing

Administrasi

Pengaduan

```
graph TD; A[Pengaduan] --> B[Preventif]; A --> C[Represif]; B --> D[mencegah kerugian]; B --> E[partisipasi]; C --> F[info atas Pelanggaran]; C --> G[Kerugian];
```

Preventif

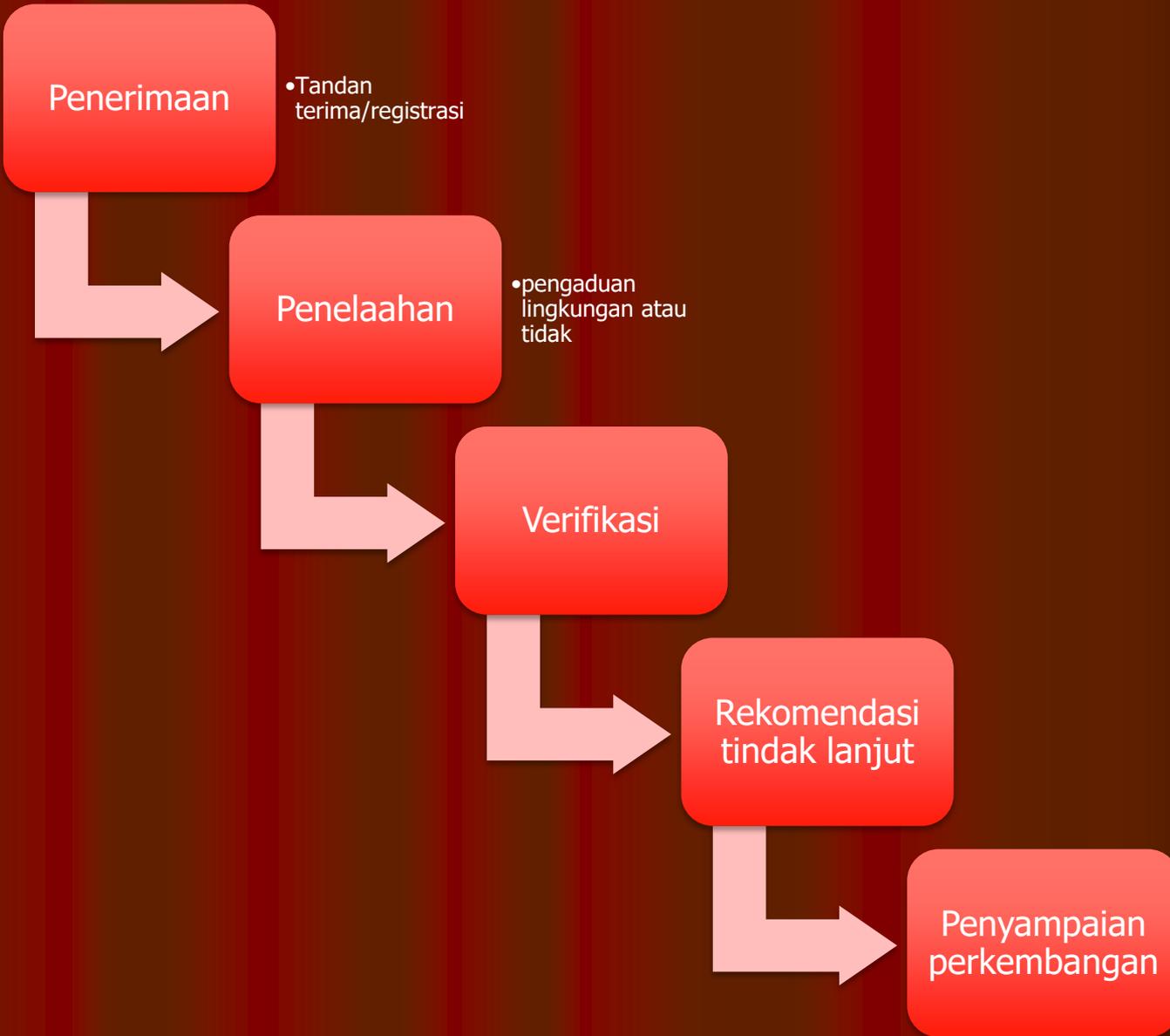
Represif

mencegah  
kerugian

info atas  
Pelanggaran

partisipasi

Kerugian



# Dasar hukum

- Pasal 92 ayat (2) & Pasal 96 UU 12/2011 tentang partisipasi Masyarakat
- Pasal 236 ayat (3) & Pasal 354 ayat (3) UU 23/2014 tentang Partisipasi Masyarakat
- Pasal 10 ayat (2) UU 30/2014 tentang AUPB salah satunya asas keterbukaan
- Pasal 166 Permendagri 80/2015 ttg partisipasi masyarakat
- Peraturan Menteri Lingkungan Nomor 9 Tahun 2010 ttg Tata Cara Pengaduan & Pengananan Kasus LLH

# Pengumuman

- Pasal 5 Staatblad Tahun 1924 No. 224 tentang Hinder Ordonantie
- Pasal 39 ayat (1) UU 32/2009 wajib mengumumkan
- Pasal 9 ayat (2) & Pasal 44 PP 27/2012 ttg Izin Lingkungan Menteri, Kepala Daerah wajib mengumumkan permohonan izin

# ALTERNATIVE SOLUSI

- Menyusun SOP
- Sosialisasi substansi dan mekanisme pengaduan
- Pemahaman Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014, khususnya keputusan fiktif positif



**TERIMA KASIH  
SEMOGA BERMANFAAT**